

**MANAJEMEN DANA BANTUAN HIBAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Kasus Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh :

**DEBIE HANDAYANI
NIM : 090563201008**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2013**

MANAJEMEN DANA BANTUAN HIBAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Kasus Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012)

Debie Handayan i/ 090563201008 / Ilmu Administrasi Negara

ABSTRAK

Belanja Hibah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini ditujukan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi pengelolaan bantuan dana hibah serta ketepatan dalam penggunaan dana bantuan oleh penerima dana bantuan hibah. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen pengelolaan dana bantuan hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Kasus pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan oleh data. Hasil penelitian adalah belum terlaksana dengan baik manajemen pengelolaan dana bantuan hibah pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012. Dijelaskan bahwa penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel melainkan key informan dan responden. Peneliti menentukan Kepala Badan sebagai Key Informan yang dalam penelitian ini diwakilinoleh Sekretrais Badan. Sedangkan responden nya adalah beberapa orang yang diambil dari Tim Pertimbangan Dana Bantuan Hibah. Hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen pengelolaan dana bantuan hibah pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012 belum terlaksana secara baik. Beberapa penghambat manajemen pengelolaan dana bantuan hibah pada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang, kurang tersedianya tenaga, staf yang belum mendapatkan diklat berkenaan dengan pengelolaan bantuan hibah, kurang lengkapnya aturan dan prosedur dalam pengelolaan dana hibah, dan tumpang tindih pengalokasian dana di belanja hibah.

Kata Kunci : Manajemen, Belanja Hibah

MANAJEMEN DANA BANTUAN HIBAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Kasus Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012)

Debie Handayan i/ 090563201008 / Ilmu Administrasi Negara

ABSTRACT

Grant expenditures must be managed in an orderly, obedient legislation, efficient, economical, effective, transparent and accountable with regard to the principle of justice, fairness, rationality and benefits to society. It is intended to, create orderly administration, accountability, transparency in the management of grants and accuracy in the use of aid funds by grant recipients. Formulation of the problem addressed in this study is how the management of Government grant funding Tanjungpinang (Case Study on National Unity and Community Protection Political Tanjungpinang Year 2012). The research method used is descriptive qualitative research, which is the process of organizing and sorting data into patterns and categories as well as the basic outline of the unit, so it can be stated theme as suggested by the data. The results are not performing well the management of grant funds in the National Unity and Community Protection Political Tanjungpinang 2012. Explained that the study did not use population and sample, but key informants and respondents. Researchers determined as the Head of the key informants in the study represented by the Secretary of the Board, while the respondent is a person who is taken from Grant Fund Advisory Team. The results, the researchers concluded that the grant funds management Management on National Unity and Community Protection Political Tanjungpinang The year 2012 has not been done well. Inhibiting factor management of grant funds in the Board Kesbangpol Linpenmas Tanjungpinang, lack of availability of personnel, staff have not received training related to grant management, less complete rules and procedures in the management of grant funds, and the allocation of funds in the overlapping grant expenditures.

Key words : Management, Grant expenditures

LATAR BELAKANG

Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu, hibah dapat diberikan dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Sedangkan pengelolaan hibah dan bantuan sosial terdiri dari pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah dan Kepala SKPD dan SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang melaksanakan fungsi ordonasi.

Menurut Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2011, hibah dapat diberikan kepada: (1) pemerintah yang ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah di Daerah yang wilayah kerjanya berada di dalam wilayah Pemerintah Kota. (2) Pemerintah daerah lainnya, terutama diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Kota dan layanan dasar umum. (3) Perusahaan daerah yang ditujukan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.; (4) Kepada masyarakat, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional, yang ditujukan bagi untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta (5) organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat.

Belanja Hibah sebagai salah satu komponen dari keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang selayaknya dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini ditujukan agar,

tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi pengelolaan bantuan dana hibah serta ketepatan dalam penggunaan dana bantuan oleh penerima dana bantuan hibah.

Perencanaan kegiatan bantuan hibah yang kurang jelas dan belum tersusun secara jelas oleh Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Hibah Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang. Akibatnya beberapa kegiatan yang diusulkan calon penerima hibah terutama Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang merupakan program atau kegiatan yang dilaksanakan pihak Kelurahan. Contoh: kegiatan pembuatan lapangan olah raga sepak Takraw dan Bola Volly, dimana kegiatan ini telah termasuk dalam kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang.

Tim Kerja pertimbangan bantuan hibah pada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang, yang bertugas dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan syarat administrasi calon penerima bantuan dana hibah, lebih terfokus kepada persyaratan-persyaratan administrasi semata. Sedangkan, untuk kegiatan verifikasi lapangan seperti dengan mendatangi Sekretariat Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penerima bantuan hibah, mengecek alamat Ormas dan LSM peneriman bantuan hibah serta mengecek kegiatan yang dilakukan Ormas atau LSM calon penerima bantuan dana hibah kurang dilakukan.

Ketersediaan tenaga Tim Kerja pertimbangan bantuan hibah pada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi calon penerima bantuan dana hibah yang terbatas jumlahnya, yaitu 11 orang (1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris dan 8 anggota). Sedangkan kebutuhannya 13 orang (1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris dan 10 anggota). Tenaga yang kurang, terutama untuk staf yang melakukan monitoring atau pengawasan terhadap verifikasi data lapangan dan yang melakukan pemeriksaan laporan pelaksanaan kegiatan penerima dana hibah.

Dari uraian tersebut dan berdasarkan kepada gejala yang ditemui, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut, yang diberi judul dengan : “**MANAJEMEN DANA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012) “.**

PERUMUSAN MASALAH

Belanja bantuan dana hibah sebagai salah satu komponen dari keuangan pada daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selayaknya dikelola secara tepat sasaran, secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, Belanja Hibah sejatinya diperuntukkan dalam rangka akselerasi pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Permasalahan yang terlihat sehubungan dengan manajemen dana bantuan hibah pada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang Tahun 2012, seperti Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang tidak memiliki aturan yang jelas tentang besaran maksimal dan minimal yang dana hibah yang diberikan, alamat penerima bantuan dana hibah yang tidak jelas hal ini tidak memenuhi salah satu persyaratan penerima hibah yaitu memiliki sekretariat yang tetap dan kerja Tim Kerja pertimbangan bantuan hibah dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi calon penerima bantuan dana hibah, lebih terfokus kepada persyaratan administrasi semata, sedangkan untuk verifikasi lapangan kurang dilakukan.

Dari uraian tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu : “
Bagaimana manajemen dana bantuan hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi
Kasus pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012)”.

TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen dana bantuan hibah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Pada Badan Kesbangpol Linpenmas.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat manajemen dana bantuan hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Pada Badan Kesbangpol Linpenmas.

KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Secara akademis penelitian ini sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah peneliti pelajari khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi bahan awal untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut.
- b. Secara paraktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dalam manajemen dana hibah.

KERANGKA TEORI.

Menurut para ahli, manajemen berkaitan erat dengan style, seni dan proses yang hidup dan dinamis dalam lingkungan organisasi dalam upayanya untuk mencapai tujuan serta bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai efektif dan efisien. Luther Gulick memberikan defensi manajemen sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih baik dan bermanfaat bagi manusia. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota-anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumberdaya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Makharita (dalam Handayani, 2007:10) menyatakan bahwa *'Manajemen is the utilization of available resources in achieving a given purpose'* (manajemen adalah pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau yang berpotensi di dalam pencapaian tujuan). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa, manajemen merupakan pemanfaatan atau penggunaan dari pada sumber-sumber yang tersedia atau yang berpotensi di dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

Selanjutnya Sikula (2000:2), mengemukakan bahwa:

“ Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, permotivasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien”.

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa, manajemen itu dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, permotivasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Millet (dalam Siswanto 2009:1), menyatakan bahwa 'manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan'. Selanjutnya Stoner dan Wanker dalam (Siswanto 2009:2), menyatakan bahwa 'manajemen yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi'.

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi serta pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada anggota.

Stoner dan Freeman (dalam Usman 2008:4), menyatakan bahwa 'manajemen adalah suatu seni dalam melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang'. Sedangkan Handoko (2003:11), berpendapat yaitu "manajemen merupakan ilmu pengetahuan, yang juga dalam artian bahwa manajemen memerlukan disiplin-disiplin ilmu lainnya dalam penerapannya, baik ilmu ekonomi, ilmu statistik, ilmu akuntansi dan lainnya".

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan, manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan individu dengan individu lain maupun sekelompok orang yang saling bekerjasama satu sama lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, kepemimpinan, stafing dan pengendalian.

Terry (2009:10) menyatakan bahwa fungsi-fungsi fundamental dari manajemen yang merupakan bagian dari pada proses manajemen, dan alat bagi seorang manajer melaksanakan pekerjaan manajemen, adalah :

- “(a) *Planning* atau perencanaan, berarti tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti.
- (b) *Organizing* atau pengorganisasian) adalah tindakan mendistribusi pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan serta memerinci hubungan-hubungan yang diperlukan.
- (c) *Actuating* atau mengerakkan, berarti mengerakkan atau merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan kemauan baik dan secara antusias.
- (d) *Controlling* atau mengawasi, berarti mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana-rencana”.

Dari pendapat tersebut di ketahui, fungsi manajemen yaitu perencanaan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti, pengorganisasian yaitu mendistribusi pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan serta memerinci hubungan yang diperlukan, mengerakkan berarti merangsang para anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan kemauan baik dan secara antusias mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana-rencana.

KONSEP OPERASIONAL.

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya untuk mengukur variabel, dimana konsep operasional berfungsi mengidentifikasi masalah yang diamati dengan jelas, logika atau penalaran yang digunakan menerangkan masalah yang diteliti.

Untuk melihat manajemen dana bantuan hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Studi Kasus Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012, maka akan mengacu kepada pendapat Terry yang menyatakan bahwa, manajemen diartikan sebagai usaha yang sistematis dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

JENIS PENELITIAN.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Faisal (Bungin (2005:34) menyatakan bahwa ” penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memahami suatu fenomena sosial sesuai dengan dunia pemahaman para pelakunya itu sendiri”.

Dalam penelitian *deskriptif* kualitatif peneliti hanya melihat atau membahas, mengenai fenomena sosial yang terdapat atau terjadi di dalam atau di tengah masyarakat, khususnya mengenai manajemen dana bantuan hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012).

LOKASI PENELITIAN.

Penelitian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kesbangpol Linpenmas) Kota Tanjungpinang. Adapun alasan peneliti meneliti di satuan kerja ini adalah:

- a. Peranan dari Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang yang penting dalam peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan sistim politik yang demokratis, khususnya di Kota Tanjungpinang.
- b. Karena Badan Kesbangpol Linpenmas merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi wewenang dalam penyaluran dana Hibah yang jumlahnya Rp. 5 milyar per tahun.

RESPONDEN DAN INFORMAN.

Sugiyono (2005:94), menyatakan bahwa “ penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel melainkan menggunakan istilah responden dan informan”. Karena itu dalam penelitian ini, penulis tidak akan menggunakan istilah populasi dan sampel, tetapi hanya menggunakan istilah responden penelitian dan informan penelitian.

Sugiyono (2005:95) menyatakan bahwa “ responden adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan (langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti”. Responden dalam penelitian yang dilakukan ini, adalah Tim Verifikasi Bantuan Dana Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kesbangpol Linpenmas) Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya Sugiyono (2005:96), menegaskan yaitu “ informan adalah seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut”. Dalam penelitian ini diambil sebanyak 4 orang pegawai yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dari Tim Kerja Pertimbangan Dana Bantuan Hibah. Pengambilan responden yang hanya 4 orang ini diambil dari masing-masing sub bidang dari Tim verifikasi bantuan dana hibah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang Nomor 05 Tahun 2012. Selanjutnya untuk mengetahui informasi lebih lanjut diperlukan Key Informan yaitu Kepala Badan Kesbangpol Linpenmas yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan, dikarenakan Kepala Badan sedang mengikuti Diklatpim IV.

JENIS DATA.

a. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh dan diolah secara langsung oleh peneliti dari responden, yaitu staf yang terlibat secara langsung dalam manajemen dana bantuan hibah pada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang, melalui wawancara yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh, seperti data manajemen dana bantuan hibah yang ada serta faktor penghambat dalam manajemen dana bantuan hibah pada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang.

b. Data Sekunder.

Yaitu data pendukung yang melengkapi data primer, yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau laporan tertulis, yang diperoleh dari Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang, yang meliputi data uraian tugas dan fungsi

Kesbangpol Linpenmas, visi dan misi, susunan organisasi, uraian tugas unit kerja, struktur organisasi, sarana dan prasarana kerja, karakteristik pegawai Kesbangpol linpenmas Kota Tanjungpinang dan data dokumen kepegawaian lainnya.

TEHNIK DAN ALAT PENGUMPUL DATA.

Dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

Observasi.

Pengamatan dilaksanakan secara langsung dilapangan berkenaan manajemen pengelolaan dana bantuan hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012). Seperti perencanaan dana bantuan hibah, pengorganisasian staf dalam pengelolaan dana hibah, pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan hibah dan lainnya. Dengan alat pengumpul datanya yaitu *Check list* dan catatan harian.

Wawancara.

Soehartono (2002:67-68) menyatakan yaitu ” wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dari pewawancara kepada informan dan jawaban informan dicatat atau direkam”. Wawancara nantinya dilakukan kepada 4 orang staf yang terlibat secara langsung dalam manajemen pengelolaan dana bantuan hibah pada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang, yaitu 4 orang pegawai serta Sekretaris Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang.

Wawancara yang dilakukan nantinya, akan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu mengenai manajemen dana bantuan hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2012), dengan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu lembaran pedoman wawancara.

Tehnik Analisis Data.

Tehnik Analisis data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sebagaimana Moeleong (2005:35), menyatakan bahwa ” analisa data kualitatif adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan oleh data”.

Alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu karena hanya ingin mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana apa adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Langkah analisisnya merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Melakukan penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, serta melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi.

Untuk itu data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya diorganisir dan disusun. Setelah tersusun akan dilakukan penafsiran dan pembahasan terhadap data yang ditemukan tersebut. Jadi dalam analisis deskriptif kualitatif ini, peneliti tidak menggunakan peralatan matematis atau tehnik statistik sebagai alat bantu analisis, tetapi menggunakan penjelasan secara deskriptif tentang apa yang ditanyakan pada responden.

HIBAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, tentang perubahan atas Peraturan Mendagri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2011, tentang pedoman pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang menyatakan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

MANAJEMEN DANA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Maka Pemerintah Kota Tanjungpinang memberikan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok/Anggota masyarakat. Dasar Hukum pemberian Hibah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, tentang perubahan atas Peraturan Mendagri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.

Belanja bantuan dana hibah sebagai salah satu komponen dari keuangan pada daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selayaknya dikelola secara tepat sasaran, secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, Belanja Hibah sejatinya diperuntukkan dalam rangka akselerasi pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Penghambat manajemen dana bantuan hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Kasus pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012).

Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu, hibah dapat diberikan dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Pemberian hibah dilakukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan memperhatikan asas keadilan adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.

Belanja bantuan dana hibah sebagai salah satu komponen dari keuangan pada daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selayaknya dikelola secara tepat sasaran, secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, Belanja Hibah sejatinya diperuntukkan dalam rangka akselerasi pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Yang menjadi penghambat manajemen dana bantuan hibah pada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang, kurang tersedianya tenaga terutama tenaga untuk verifikasi proposal pemohon bantuan hibah dan tenaga pengawas, staf yang belum mendapatkan diklat berkenaan dengan pengelolaan bantuan hibah, kurang lengkapnya aturan dan prosedur dalam manajemen dana hibah dan tumpang tindih pengalokasian dana di belanja hibah.

KESIMPULAN.

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajemen dana bantuan hibah pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012 belum terlaksana secara baik. Hal ini disebabkan, belum terlaksana dengan baiknya pengorganisasian, terutama kesediaan staf yang kurang untuk verifikasi proposal pemohon bantuan hibah dan staf pengawas. Pengerakkan staf yang kurang, seperti belum keseluruhan staf diberikan diklat tentang aturan dan prosedur kerja manajemen dana bantuan kepada staf. Pengawasan yang belum secara optimal dijalankan, misal kurangnya pengawasan secara langsung terhadap pemohon bantuan hibah dan lainnya.
2. Beberapa penghambat dalam manajemen dana bantuan hibah pada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang, yaitu kurang tersedianya tenaga terutama tenaga untuk verifikasi proposal pemohon bantuan hibah dan tenaga pengawas, staf yang belum mendapatkan diklat berkenaan dengan pengelolaan bantuan hibah, kurang lengkapnya aturan dan prosedur dalam pengelolaan dana hibah, dan tumpang tindih pengalokasian dana di belanja hibah.

SARAN-SARAN.

Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu :

1. Pihak Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang khususnya Tim Kerja Pertimbangan dana bantuan hibah perlu melakukan upaya penyusunan staf dan beban kerja dalam pelaksanaan tugas manajemen pengelolaan dana bantuan dana

hibah. Hal ini ditujukan agar memadai jumlah staf dengan beban kerja yang ada dalam pengelolaan dana bantuan hibah.

2. Untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan staf yang bertugas dalam pengelolaan dana bantuan hibah pada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang, maka perlu pelaksanaan diklat secara merata kepada seluruh staf.
3. Diharapkan kepada Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang untuk lebih mengutamakan atau aktif melakukan pengawasan secara langsung dari pada pengawasan tidak langsung, dengan melihat kelokasi atau lapangan dalam penilaian proposal bantuan hibah yang akan diberikan bantuan.
4. Perlunya Badan Kesbangpol Linpenmas Kota Tanjungpinang untuk membuat atau menetapkan pedoman besaran maksimal dan minimal jumlah dana bantuan hibah yang dapat diberikan kepada para penerima hibah. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi gap/rentang yang cukup besar terkait jumlah besaran dana bantuan hibah yang diberikan untuk masing-masing calon penerima hibah
5. Perlunya melibatkan masyarakat setempat, baik ketua RT, Ketua Rw maupun masyarakat luas dalam menilai kelayakan suatu penerima bantuan hibah yang diberikan. Hal ini ditujukan agar dana bantuan hibah tidak salah sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Bungin. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen, Edisi Kelima, Jilid I*, Jakarta : Erlangga.
- Darsono dan Gunawan Saputra. 2011. *Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Tanjungpinang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Handayadiningrat, Soewarno. 2007. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Haji Masagung
- Handoko. T, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moenir, AS. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Kurnia.
- Moekijat. 2000. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Bandung : Pionir Jaya
- Meoleong, J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.**
- Reksohadiprodjo, Sukanto dan Gitosudarmo, Indriyo. 2008. *Manajemen Produksi*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Siagian, P. Sondang.2008. *Manajemen Strategik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswanto. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soehartono. Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan ke lima. Jakarta : Remaja Rosdakarya.
-

Sugiono. 2005, *Metode Penelitian Administratif*, Bandung : Alfabeta.

Sule Tisnawati dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama,.

Usman, Husian. 2008. *Manajemen: Teori Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Terry, GR. 2009. Terjemahan Winardi. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : Alumni

Waldo, Dwigh. 2005. *Public Administration*. Jakarta: Bumi Aksara.